

Analisis Dampak Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Masyarakat di Kabupaten Bireuen

Ismasudayanti*, Cut Azizah, Sitti Zubaidah

Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Almuslim, Bireuen, Indonesia

*Koresponden email: ismasudayanti05@gmail.com

Diterima: 20 September 2024

Disetujui: 27 September 024

Abstract

The Uninhabitable Houses Programme is a government programme to increase the number of habitable houses for low-income people who do not yet have a house that meets the appropriate standards. This government programme is better known as the Self-Help Housing Stimulant Assistance Programme or BSPS. This government assistance has had environmental, economic and social impacts on the people of Bireuen District. The aim of this research is to determine the condition of uninhabitable houses in Bireuen Regency after renovation and to analyse the impact of the Uninhabitable House Rehabilitation Program on the environmental, social and economic conditions of the community in Bireuen Regency. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques used were direct observation, questionnaires and primary data. The results of the research showed that the programme of rehabilitation of uninhabitable houses in Bireuen Regency had an impact on the community environment, namely the improvement of the quality of the houses in terms of the availability of access to sanitation and clean water, and the fulfilment of lighting and ventilation standards.

Keywords: *impact, rehabilitation, uninhabitable houses, environmental, economic, social*

Abstrak

Program Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah sesuai dengan standar kelayakan. Program pemerintah ini lebih dikenal dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Bantuan pemerintah ini telah memberi dampak terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat di kabupaten Bireuen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bireuen setelah direnovasi dan menganalisis dampak dari program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat di kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, kuesioner dan data primer. Hasil penelitian didapatkan bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bireuen memberikan dampak terhadap lingkungan masyarakat yaitu meningkatnya kualitas bangunan rumah dari aspek ketersediaan akses sanitasi dan air bersih, dan terpenuhinya standar pencahayaan dan penghawaan.

Kata Kunci: *dampak, rehabilitasi, rumah tidak layak huni, lingkungan, ekonomi, sosial*

1. Pendahuluan

Selain sandang dan pangan, tempat tinggal atau rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Rumah yang diinginkan tentu harus memadai, artinya memiliki ruang yang cukup dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk tinggal di sana. Rumah layak huni tidak hanya membuat orang merasa aman dan nyaman, tetapi juga membangun lingkungan yang sehat dan memungkinkan pertumbuhan potensi manusia yang kompetitif. Peningkatan kualitas hidup yang layak, bermartabat, dan terjangkau, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang aman dan nyaman, adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak komunitas berpenghasilan rendah masih ada di Indonesia, yang berarti banyak rumah masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) [1].

Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar dasar kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penghuninya. Kriteria rumah layak huni mencakup struktur bangunan yang kokoh, ventilasi dan pencahayaan yang memadai, akses air bersih, sanitasi yang baik, serta perlindungan dari ancaman cuaca ekstrem dan bahaya lingkungan. Selain itu, rumah tersebut harus menyediakan ruang yang cukup untuk

aktivitas sehari-hari dan mendukung kesejahteraan fisik maupun mental penghuninya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan aman untuk kehidupan yang berkualitas. Program Rumah Layak Huni adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan hunian yang aman, sehat, dan memenuhi standar dasar perumahan. Melalui bantuan langsung seperti subsidi atau pembangunan rumah baru, program ini berupaya mengurangi angka hunian tidak layak dan meningkatkan kesejahteraan sosial [2].

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki atau membangun rumah layak huni. Bantuan ini diberikan dalam bentuk stimulan, yaitu dukungan dana dan material bangunan, yang mendorong masyarakat untuk bergotong-royong dan berpartisipasi secara swadaya dalam proses perbaikan rumah mereka. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang sehat, aman, dan layak ditempati. Tujuan lain dari program BSPS adalah untuk menghidupkan kembali fungsi sosial dan meningkatkan kualitas rumah masyarakat dengan memperbaiki kondisi rumah dan sarpras lingkungan secara keseluruhan atau sebagian disertai dengan gotong royong, semangat kebersamaan, dan nilai ketaqwaan dari teman-teman sosial masyarakat [3].

Untuk 1.280 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bireuen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Jenderal Perumahan telah menetapkan anggaran sebesar Rp22,4 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bireuen (Info Publik, 2020). Program BSPS adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bireuen untuk memberikan kenyamanan dan keamanan tempat tinggal, serta meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan bantuan pemerintah ini akan menghasilkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dengan memenuhi salah satu kebutuhan dasar, yaitu rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Rumah yang layak huni adalah rumah yang sehat dan harus diupayakan keberadaannya. Jika tidak dipenuhi, akan menimbulkan masalah, seperti keterlantaran dan masalah kesejahteraan sosial keluarga. [4]

Dalam upaya untuk mempercepat pembangunan rumah layak huni, pemerintah Kabupaten Bireuen meluncurkan program bantuan keuangan pemerintah desa untuk rumah tidak layak huni kepada penduduk desa berpenghasilan rendah di Kabupaten Bireuen. Program ini membutuhkan partisipasi masyarakat dalam swadaya dan gotong royong sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan inisiatif dan swadaya masyarakat.

Tidak diragukan lagi, program BSPS akan berdampak positif pada masyarakat di Kabupaten Bireuen, khususnya mereka yang menerima program tersebut. Namun, bahkan jika dampak positif dari program ini membawa perubahan kondisi perumahan dari yang tidak layak huni menjadi yang layak huni, masyarakat akan menghadapi beberapa hambatan atau bahkan masalah.

Karena kondisi fisik rumah masyarakat berbeda, bentuk perbaikannya juga akan berbeda. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dana atau biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah memerlukan biaya yang besar. Masyarakat menyadari bahwa mereka tidak dapat bergantung pada dana tersebut untuk pembangunan atau perbaikan rumah, jadi mereka harus berusaha keras untuk mencari biaya tambahan dari pemerintah Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari program Rumah Tidak Layak Huni terhadap masyarakat di kabupaten Bireuen.

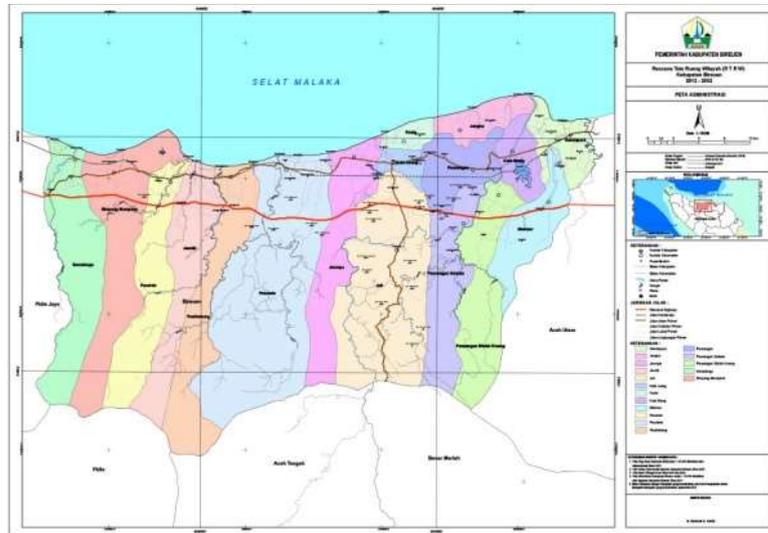
2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengamatan langsung lapangan. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder [5]. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui pengamatan langsung lapangan, wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner untuk memperoleh data karakteristik responden, aspek lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat. Data Sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh untuk memperoleh informasi pendukung penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bireuen. Peta lokasi penelitian ditampilkan pada **Gambar 1**. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini, meliputi: peta lokasi, kuesioner, daftar pertanyaan terstruktur, kamera, laptop, alat tulis dan perekam suara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Kabupaten Bireuen yang terdiri dari 17 Kecamatan sebanyak 81.899 Kepala Keluarga. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan cara *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti pada saat penelitian berlangsung. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 86 Kepala Keluarga.

Pengolahan dan analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif [6]. Analisis kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik fenomena yang ditemukan selama penelitian, sedangkan pengolahan dan analisis data kuantitatif menggunakan Software Microsoft Excel dan Aplikasi SPSS berdasarkan data karakteristik responden dan data berdasarkan kuesioner aspek lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat yang dikumpulkan.



Gambar 1: Peta Kabupaten Bireuen
Sumber: [7]

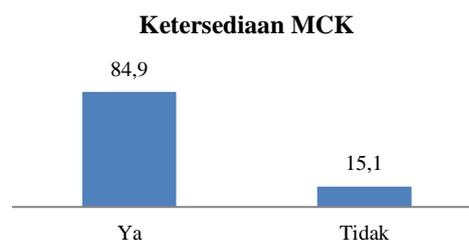
3. Hasil Dan Pembahasan

Dampak Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat merujuk pada keseluruhan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan fisik yang mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok dalam suatu komunitas. Lingkungan ini mencakup interaksi antar individu, norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, serta faktor-faktor ekonomi yang membentuk cara hidup masyarakat. Selain itu, lingkungan masyarakat juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi geografis yang ada, yang bersama-sama berkontribusi pada pembentukan identitas, perilaku, dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini secara tidak langsung akan memperbaiki kualitas hidup dan menghindarkan dari berbagai macam penyakit dengan adanya perbaikan lingkungan masyarakat di Kabupaten Bireuen, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai item-item dari lingkungan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketersediaan MCK

MCK adalah suatu tempat untuk membersihkan tubuh atau mandi, untuk itu ketersediaan dan kebersihan MCK merupakan hal yang utama diperhatikan. Demikian juga kebersihan keluarga yang berpusat di MCK menjadikan kebersihan MCK benar-benar penting. Ketersediaan MCK mempengaruhi terbentuknya kualitas rumah dan lingkungan sehat. Ketersediaan MCK pada masyarakat ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini:



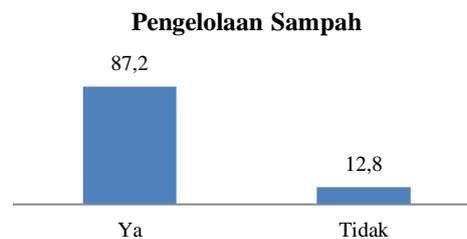
Gambar 2. Distribusi Frekuensi Ketersediaan MCK

Berdasarkan **Gambar 2** tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang memiliki MCK sebanyak 73 orang atau sebesar 84,9% sedangkan yang tidak memiliki MCK sebanyak 13 orang atau sebesar 15,1%. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas MCK yang buruk menjadi lebih baik bagi masyarakat yang mendapatkan program BSPS, dimana sebelum mendapatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas MCK sendiri, sedangkan masyarakat sekitar pun memberikan dampak lingkungan yang lebih baik, dengan tersedianya MCK di tiap rumah limbahnya mudah dikendalikan dan pencemaran lingkungan dapat dibatasi, melindungi dari gangguan estetika, bau dan penggunaan sarana yang aman dan melindungi pencemaran pada penyediaan air bersih dan lingkungan.

Fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang disediakan bagi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya MCK yang layak, penerima BSPS mendapatkan akses terhadap sanitasi yang lebih baik, yang secara langsung mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan. Fasilitas ini juga membantu mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sanitasi buruk, serta meningkatkan kenyamanan dan martabat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keberadaan MCK yang memadai mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan layak huni [8].

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah secara sistematis untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan estetika. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan serta mendukung prinsip keberlanjutan melalui daur ulang, pengurangan sumber limbah, dan pengelolaan yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemilahan sampah dari sumbernya. Pengelolaan sampah pada masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 3** berikut ini:



Gambar 3. Distribusi Frekuensi Pengelolaan Sampah

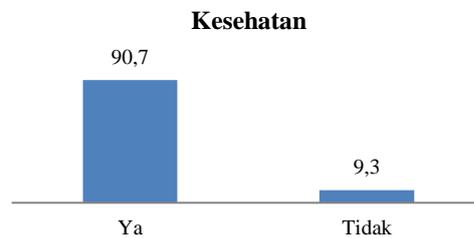
Berdasarkan **Gambar 3** tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang mempunyai pengelolaan sampah sebanyak 75 orang atau sebesar 87,2% sedangkan yang tidak mempunyai pengelolaan sampah sebanyak 11 orang atau sebesar 12,8%. Lingkungan yang baik bukan hanya tentang menjaga kebersihan saja, tetapi juga pengelolaan sampah yang baik dan benar yang bermanfaat bagi lingkungan baik penerima BSPS maupun masyarakat sekitarnya. Pengelolaan sampah yang baik memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan mengelola sampah secara efektif, kita dapat mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara, sehingga menjaga ekosistem tetap sehat. Selain itu, pengelolaan sampah seperti daur ulang dan pengomposan membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), memperpanjang umur TPA, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain berdampak positif bagi lingkungan, pengelolaan sampah juga membuka peluang ekonomi melalui industri daur ulang dan menciptakan lapangan kerja di sektor tersebut.

Menurut Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS Tahun 2021, Pengelolaan sampah di rumah dimulai dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Sampah organik, seperti sisa makanan dan daun, dapat dikomposkan untuk menjadi pupuk. Sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam, harus dipisahkan dan dibersihkan sebelum dibawa ke tempat daur ulang. Sampah berbahaya, seperti baterai dan obat-obatan kadaluwarsa, perlu dibuang di tempat khusus. Selain itu, kurangi penggunaan barang sekali pakai dan selalu gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengurangi volume sampah.

3. Kesehatan

Air bersih adalah air yang bebas dari kontaminasi atau polutan, seperti bahan kimia, limbah, atau mikroorganisme berbahaya, yang aman untuk dikonsumsi, digunakan untuk memasak, mandi, dan aktivitas

sehari-hari lainnya. Kualitas air bersih diatur oleh standar tertentu untuk memastikan kesehatannya, serta keberlanjutannya penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Air bersih mendukung kesehatan, kebersihan, dan pencegahan penyakit, menjadikannya salah satu sumber daya paling vital bagi keberlangsungan hidup. Kesehatan (sumber air bersih) pada masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Distribusi Frekuensi Kesehatan

Berdasarkan **Gambar 4** tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang sudah memenuhi kesehatan (sumber air bersih) sebanyak 78 orang atau sebesar 90,7% sedangkan yang tidak memenuhi kesehatan (sumber air bersih) sebanyak 8 orang atau sebesar 9,3%. Air bersih memiliki peranan penting dalam kehidupan keluarga, karena merupakan kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Ketersediaan air bersih mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, seperti memasak, mencuci, mandi, dan minum, yang semuanya berkontribusi pada kualitas hidup keluarga. Selain itu, air bersih juga penting dalam pencegahan penyakit, karena air yang tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Oleh karena itu, akses terhadap air bersih menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi setiap anggota keluarga.

Program rumah layak huni sangat penting bagi kesehatan masyarakat, karena menyediakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman untuk tinggal. Rumah yang memenuhi standar layak huni memiliki ventilasi yang baik, sanitasi yang memadai, serta perlindungan dari cuaca ekstrem, yang dapat mencegah penyakit menular seperti infeksi pernapasan dan diare. Selain itu, rumah yang sehat juga berkontribusi pada kesehatan mental, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup penghuni. Dengan adanya program ini, pemerintah dapat membantu mengurangi angka penyakit yang berkaitan dengan kondisi tempat tinggal yang buruk [9].

4. Sirkulasi Udara

Sirkulasi udara adalah proses perpindahan atau pergerakan udara dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu ruangan atau lingkungan. Proses ini terjadi secara alami melalui perbedaan tekanan dan suhu, atau secara buatan dengan bantuan alat seperti kipas atau ventilasi. Sirkulasi udara yang baik penting untuk menjaga kualitas udara, mengurangi kelembapan berlebih, serta mendistribusikan oksigen dan suhu secara merata, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat. Ketersediaan MCK pada masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 5** berikut ini:



Gambar 5. Distribusi Frekuensi Sirkulasi Udara

Berdasarkan **Gambar 5** tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang tersedia sirkulasi udara sebanyak 79 orang atau sebesar 91.9% sedangkan yang tidak tersedia sirkulasi udara sebanyak 7 orang atau sebesar 8.1%, yang belum siap jendela, ventilasi dan tombak layar sehingga udara sulit masuk. Sirkulasi udara yang baik memiliki dampak signifikan bagi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Rumah yang didesain dengan sirkulasi udara yang optimal tidak hanya meningkatkan kenyamanan penghuni, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan. Udara segar yang mengalir lancar membantu mengurangi kelembapan berlebih, mencegah pertumbuhan jamur, dan menurunkan risiko

penyakit pernapasan. Selain itu, sirkulasi yang baik juga bisa mengurangi kebutuhan pendingin ruangan, sehingga lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Hal ini menjadikan rumah hasil program BSPS lebih layak huni dan sehat.

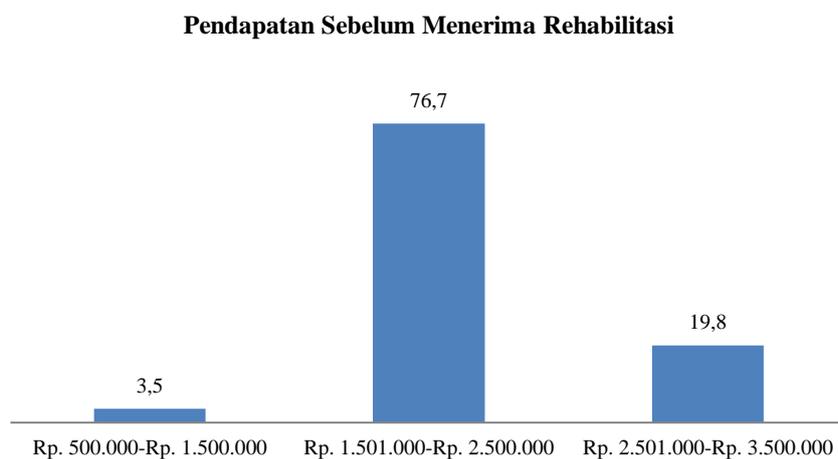
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Sirkulasi udara yang baik adalah salah satu syarat penting untuk menciptakan rumah yang layak huni. Sirkulasi udara yang optimal memastikan pertukaran udara segar dan pengeluaran udara kotor, yang membantu menjaga kesehatan penghuni dan mencegah akumulasi kelembapan. Untuk mencapai ini, rumah perlu memiliki ventilasi yang cukup, baik melalui jendela, ventilasi atap, maupun sistem ventilasi mekanis jika diperlukan. Selain itu, penempatan ruangan dan sirkulasi yang baik juga harus dipertimbangkan, agar udara dapat mengalir dengan lancar di seluruh bagian rumah. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, rumah dapat menjadi lebih nyaman dan sehat untuk dihuni. [10]

Dampak Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Ekonomi Masyarakat

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk. Dengan memperbaiki kondisi rumah, masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan aman, yang berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Peningkatan kondisi hunian juga mendorong aktivitas ekonomi lokal, karena masyarakat lebih terdorong untuk berinvestasi dalam usaha kecil dan memperkuat jaringan sosial. Selain itu, program ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi pekerja konstruksi dan penyedia material, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional. Secara keseluruhan, rehabilitasi RTLH tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

1. Pendapatan Sebelum Menerima Rehabilitasi

Pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu bulan atau satu tahun. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji, upah, keuntungan usaha, sewa, dividen, dan pendapatan lain yang diperoleh. Pendapatan rumah tangga sangat penting karena mempengaruhi daya beli dan kualitas hidup keluarga, serta berperan dalam perencanaan keuangan, konsumsi, dan tabungan. Dengan memahami pendapatan rumah tangga, kita dapat lebih baik mengelola keuangan dan merencanakan kebutuhan masa depan.. Tingkat pendapatan sebelum menerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 6** berikut ini:



Gambar 6. Distribusi Frekuensi Pendapatan Sebelum Menerima Rehabilitasi

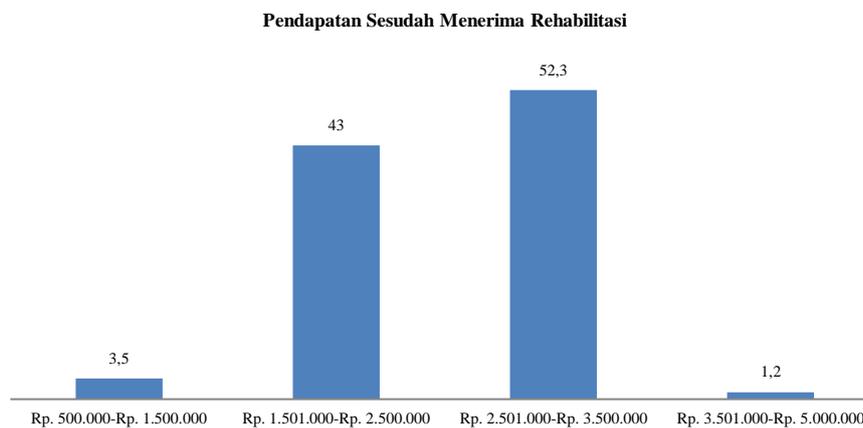
Berdasarkan **Gambar 6** tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan sebelum menerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat tertinggi berkisar antara Rp. 1.501.000 - Rp. 2.500.000 sebanyak 66 orang atau sebesar 76,7% sedangkan terendah berkisar antara Rp. 500.000 - Rp. 1.500.000 sebanyak 3 orang atau sebesar 3,5%, pendapatan rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap terciptanya rumah layak huni. Ketersediaan dana yang memadai memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti membangun atau merenovasi rumah agar sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan. Rumah yang layak huni biasanya dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang baik, serta ruang yang cukup untuk setiap anggota keluarga. Sebaliknya, rumah tangga dengan

pendapatan rendah sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi standar ini, yang dapat mengakibatkan kondisi hunian yang buruk dan berdampak negatif pada kesehatan serta kualitas hidup penghuni. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan rumah tangga menjadi kunci dalam upaya menciptakan hunian yang layak dan berkelanjutan.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki kondisi hunian mereka. Syarat utama penerima BSPS adalah memiliki penghasilan yang tidak melebihi batas yang ditentukan, biasanya di bawah angka tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, calon penerima harus memiliki lahan atau rumah yang layak untuk diperbaiki, dan tidak sedang menerima bantuan perumahan lainnya. Proses seleksi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi, sehingga bantuan ini tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan [11].

2. Pendapatan Sesudah Menerima Rehabilitasi

Pendapatan keluarga adalah total uang yang diterima oleh semua anggota keluarga dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu bulan atau satu tahun. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji dari pekerjaan, usaha yang dijalankan, investasi, dan bantuan sosial. Pendapatan keluarga berperan penting dalam menentukan taraf hidup, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta perencanaan keuangan untuk masa depan. Pengelolaan pendapatan yang baik dapat membantu keluarga mencapai kestabilan finansial dan kesejahteraan. Tingkat pendapatan sesudah menerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 7** berikut ini:



Gambar 7. Distribusi Frekuensi Pendapatan Sesudah Menerima Rehabilitasi

Berdasarkan **Gambar 7** tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan sesudah menerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat tertinggi berkisar antara Rp. 2.501.000 - Rp. 3.500.000 sebanyak 45 orang atau sebesar 52.3% sedangkan terendah berkisar antara Rp. 3.501.000 - Rp. 5.000.000 sebanyak 1 orang atau sebesar 1.2%. Pendapatan penerima Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) yang bekerja sebagai tukang bangunan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan adanya BSPS, para tukang bangunan mampu meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan penghasilan, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung pendidikan anak-anak. Selain itu, program ini mendorong peningkatan keterampilan dan pengetahuan di bidang konstruksi, yang berpotensi membuka peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Secara keseluruhan, BSPS tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.

Selain itu, program ini mendorong peningkatan keterampilan dan pengetahuan di bidang konstruksi, yang berpotensi membuka peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Lebih jauh lagi, pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan ini dapat digunakan untuk investasi dalam alat dan bahan bangunan yang lebih baik, sehingga meningkatkan efisiensi kerja mereka. Hal ini juga dapat menciptakan efek domino positif bagi ekonomi lokal, karena tukang bangunan yang lebih berpenghasilan cenderung menghabiskan uang mereka di komunitas, yang mendukung usaha kecil dan menciptakan lapangan kerja tambahan. Secara keseluruhan, BSPS tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik dan meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat [12].

3. Swadaya Yang Dikeluarkan

Swadaya dalam konteks program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merujuk pada partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan secara mandiri. Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berkontribusi baik secara finansial maupun non-finansial dalam membangun rumah yang layak huni. Dengan adanya swadaya, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hunian mereka, serta memperkuat solidaritas dan kerjasama dalam lingkungan komunitas. Program BSPS juga memberikan dukungan berupa bantuan stimulan yang dapat mempercepat proses pembangunan perumahan yang lebih baik dan berkelanjutan. Swadaya yang dikeluarkan untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat ditunjukkan **Gambar 8**.



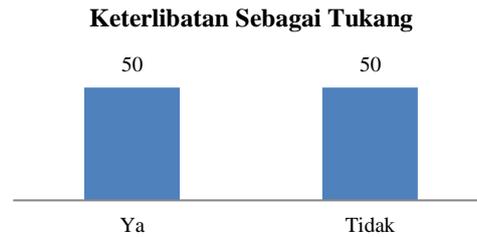
Gambar 8. Distribusi Frekuensi Swadaya Yang Dikeluarkan

Berdasarkan **Gambar 8** tersebut dapat diketahui bahwa Swadaya yang dikeluarkan untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat tertinggi berkisar antara Rp. 500.000 - Rp. 1.500.000 sebanyak 61 orang atau sebesar 70,9% sedangkan terendah berkisar antara Rp. 500.000 - Rp. 1.500.000 sebanyak 6 orang atau sebesar 7,0%. Sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat ada pengeluaran dana tambahan yang berkisar antara Rp. 500.000 - Rp. 1.500.000, Keterbatasan dana keluarga untuk swadaya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sering menjadi penghambat bagi banyak penerima manfaat dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. Meskipun Program BSPS dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, banyak keluarga yang menghadapi tantangan finansial dalam menyisihkan dana tambahan untuk kontribusi swadaya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan sehari-hari yang mendesak, cicilan utang, atau ketidakstabilan pendapatan. Akibatnya, meskipun program tersebut menawarkan bantuan, realisasi perbaikan rumah sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya keuangan yang ada.

Keterbatasan dana juga mempengaruhi kemampuan keluarga untuk merencanakan dan mengelola proyek pembangunan secara efektif. Keluarga yang bergantung pada dana swadaya sering kali tidak memiliki akses ke informasi atau pelatihan yang memadai tentang manajemen proyek, sehingga mereka kesulitan dalam mengalokasikan dana secara efisien. Hal ini berpotensi menyebabkan pemborosan dan kegagalan dalam mencapai tujuan perbaikan rumah yang diinginkan. Oleh karena itu, dukungan tambahan dalam bentuk pelatihan dan akses ke sumber daya keuangan sangat diperlukan agar program BSPS dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat [13].

4. Keterlibatan Sebagai Tukang

Tukang bangunan adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dalam melakukan berbagai pekerjaan konstruksi, seperti membangun, merenovasi, dan memperbaiki struktur bangunan. Mereka menguasai teknik dan penggunaan alat-alat bangunan, serta memahami berbagai material konstruksi, seperti beton, kayu, dan besi. Keterlibatan sebagai tukang pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 9** berikut ini:



Gambar 9. Distribusi Frekuensi Keterlibatan Sebagai Tukang

Berdasarkan **Gambar 9** tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan sebagai tukang pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada masyarakat sebanyak 50 orang atau sebesar 50,0% sedangkan yang tidak terlibat sebanyak 50 orang atau sebesar 50,0%, hal ini membuktikan bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

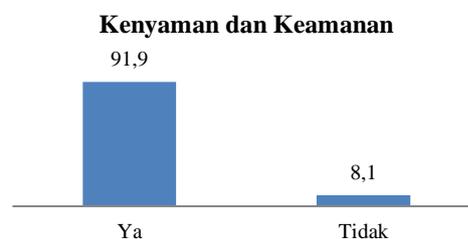
Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dari segi ekonomi. Dengan menyediakan hunian yang layak, program ini meningkatkan kualitas hidup penghuni, yang berpotensi meningkatkan produktivitas kerja mereka. Rumah yang lebih baik juga dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan keamanan, sehingga masyarakat merasa lebih stabil dan nyaman. Selain itu, rehabilitasi rumah dapat menciptakan lapangan kerja lokal melalui pembangunan dan renovasi, yang selanjutnya meningkatkan perekonomian setempat dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi pada peningkatan daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan [14].

Dampak Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Sosial Masyarakat

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sosial masyarakat. Dengan memperbaiki kondisi hunian, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penghuni, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di lingkungan. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kondisi tidak layak dapat merasa lebih nyaman dan aman, yang berdampak pada peningkatan kesehatan fisik dan mental. Selain itu, program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi, meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan, serta menciptakan peluang kerja lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan ekonomi komunitas.

1. Kenyamanan dan Keamanan

Kenyamanan di dalam rumah adalah hal yang terpenting untuk dicapai. Anda bisa mendapat rumah yang nyaman mulai dari menjaga kebersihan, keamanan dan Kenyamanan. Rumah yang nyaman tentunya harus aman. Baik secara internal maupun eksternal. Aman secara internal artinya rumah tersebut sehat untuk ditinggali, sedangkan aman secara eksternal merujuk kepada keadaan lingkungan di luar rumah. Kenyamanan dan keamanan dalam rumah pada masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 10** berikut ini:



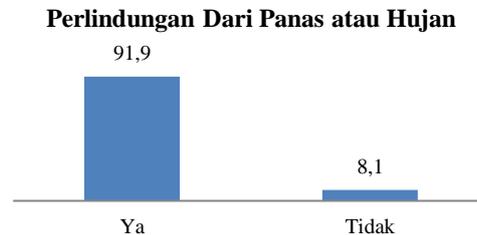
Gambar 10. Distribusi Frekuensi Kenyamanan dan Keamanan

Berdasarkan **Gambar 10** tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat terfasilitasi dalam bentuk Kenyamanan dan keamanan dalam rumah sebanyak 79 orang atau sebesar 91,9%, sedangkan masyarakat yang tidak Kenyamanan dan keamanan dalam rumah sebanyak 7 orang atau sebesar 8,1%. Kenyamanan di dalam rumah adalah hal yang terpenting untuk dicapai. Anda bisa mendapatkannya rumah yang nyaman mulai dari menjaga kebersihan, keamanan dan Kenyamanan. Rumah yang nyaman tentunya harus aman.

Baik secara internal maupun eksternal. Aman secara internal artinya rumah tersebut sehat untuk ditinggali, sedangkan aman secara eksternal merujuk kepada keadaan lingkungan di luar rumah [15].

2. Perlindungan Dari Panas atau Hujan

Rehabilitasi rumah tidak layak huni terhadap kondisi sosial berdasarkan perlindungan dari panas dan hujan. Perlindungan dari panas atau hujan pada masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 11** berikut ini:



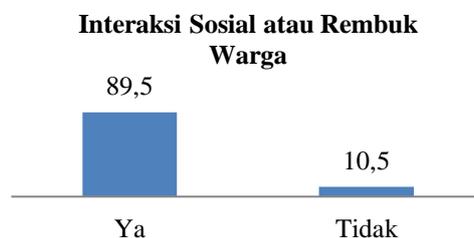
Gambar 11. Distribusi Frekuensi Perlindungan Dari Panas atau Hujan

Berdasarkan **Gambar 11** tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat terlindungi dari panas dan hujan sebanyak 79 orang atau sebesar 91,9%, sedangkan masyarakat yang tidak terlindungi dari panas dan hujan sebanyak 7 orang atau sebesar 8,1%, program ini mendorong interaksi sosial yang lebih baik di dalam komunitas. Ketika lingkungan tempat tinggal menjadi lebih layak, masyarakat cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Hal ini memperkuat hubungan antarwarga, meningkatkan rasa memiliki, dan membangun solidaritas. Dengan demikian, rehabilitasi rumah tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga berkontribusi pada penguatan jaringan sosial yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki dampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan dari panas dan hujan. Dengan adanya rehabilitasi, rumah-rumah yang sebelumnya tidak memadai kini dilengkapi dengan struktur yang lebih baik, atap yang kuat, dan ventilasi yang memadai. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan fisik penghuni, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan mereka, mengurangi risiko penyakit yang sering muncul akibat kondisi tempat tinggal yang buruk [12].

3. Interaksi Sosial atau Rembuk Warga

Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berkomunikasi dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks sosial. Proses ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, seperti lisan, nonverbal, dan tindakan sosial, yang berlangsung dalam berbagai situasi dan lingkungan. Interaksi sosial sangat penting dalam membentuk hubungan, norma, dan budaya di dalam masyarakat, serta memainkan peran kunci dalam perkembangan individu dan kelompok. Melalui interaksi ini, orang dapat berbagi informasi, nilai, dan pengalaman, yang pada gilirannya membangun jaringan sosial dan memperkuat solidaritas dalam komunitas. Interaksi sosial atau rembuk warga pada masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 12** berikut ini:



Gambar 12. Distribusi Frekuensi Interaksi Sosial atau Rembuk Warga

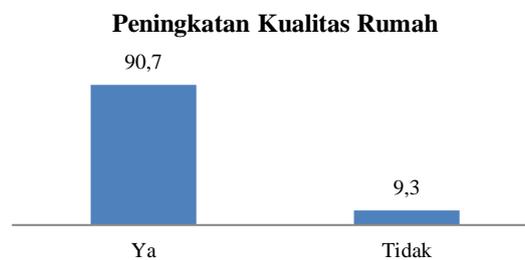
Berdasarkan **Gambar 12** tersebut dapat diketahui bahwa interaksi sosial atau rembuk warga pada masyarakat sebanyak 77 orang atau sebesar 89,5% sedangkan yang tidak sebanyak 9 orang atau sebesar 10,5%, rehabilitasi rumah juga dapat memperkuat solidaritas di antara anggota masyarakat. Ketika individu atau kelompok berpartisipasi dalam program rehabilitasi, mereka tidak hanya membantu satu sama lain, tetapi juga membangun jaringan dukungan yang kuat. Interaksi ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap

lingkungan mereka, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial, dan memperkuat ikatan antarwarga. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di dalam komunitas, menjadikan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki dampak signifikan terhadap interaksi sosial dalam masyarakat. Dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak, program ini meningkatkan kualitas hidup penghuni, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan komunitas. Rumah yang lebih baik menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi keluarga, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan sosial yang lebih erat dengan tetangga dan anggota masyarakat lainnya. Kegiatan seperti gotong royong dalam perbaikan infrastruktur atau acara komunitas menjadi lebih mudah dilakukan ketika lingkungan rumah mendukung interaksi. [16]

4. Peningkatan Kualitas Rumah

Peningkatan kualitas rumah merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fisik, fungsional, serta estetika hunian. Hal ini mencakup perbaikan struktur bangunan, peningkatan sistem sanitasi, efisiensi energi, serta pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan peningkatan kualitas rumah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan tinggal yang lebih nyaman, aman, dan sehat bagi penghuninya, serta meningkatkan nilai properti secara keseluruhan.. Peningkatan kualitas rumah ditunjukkan pada **Gambar 13** berikut ini:



Gambar 13. Distribusi Frekuensi Peningkatan Kualitas Rumah

Berdasarkan **Gambar 13** tersebut dapat diketahui bahwa yang mengalami peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada masyarakat sebanyak 78 orang atau sebesar 90,7% sedangkan yang tidak mengalami peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada masyarakat sebanyak 8 orang atau sebesar 9,3%, rehabilitasi rumah juga berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi dan sosial masyarakat. Rumah yang diperbaiki tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga meningkatkan harga jual atau sewa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Lebih jauh lagi, program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lingkungan, menciptakan rasa memiliki, dan memperkuat ikatan sosial antarwarga. Dengan demikian, program rehabilitasi rumah tidak layak huni berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung pengembangan komunitas yang berkelanjutan.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat. Dengan memperbaiki struktur fisik rumah, seperti atap, dinding, dan fasilitas sanitasi, program ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan hunian, tetapi juga mendukung kesehatan penghuninya. Masyarakat yang tinggal di rumah yang telah direhabilitasi cenderung mengalami penurunan risiko penyakit yang berkaitan dengan kondisi tempat tinggal yang tidak sehat, seperti infeksi saluran pernapasan dan penyakit kulit [17].

4. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bireuen memberikan dampak terhadap lingkungan masyarakat yaitu meningkatnya kualitas bangunan rumah dari aspek ketersediaan akses sanitasi dan air bersih, dan terpenuhinya standar pencahayaan dan penghawaan.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni memacu perekonomian bagi penerima manfaat maupun masyarakat setempat yang terlibat sebagai tukang dan pembantu tukang dalam pekerjaan fisik bangunan, dan juga berdampak terhadap peningkatan kebutuhan material alam bagi toko penyalur bahan bangunan di wilayah setempat.

Dengan adanya bantuan rumah layak huni mampu meningkatkan kualitas bangunan rumah dari segi struktur maupun non struktur bangunan sehingga menimbulkan keamanan dan kenyamanan bagi penerima manfaat. Adanya interaksi sosial karena program ini melibatkan kelompok penerima bantuan, pendamping desa, masyarakat dan pemerintah setempat.

Saran/Rekomendasi

Diharapkan agar pemerintah terkait meningkatkan kesadaran publik tentang program rehabilitasi rumah tidak layak huni dan membantu penerimanya menjadi lebih percaya diri dan mandiri dalam meningkatkan kualitas rumah mereka. Diharapkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni akan berlanjut tahun berikutnya karena sangat membantu pembangunan rumah baru.

5. Daftar Pustaka

- [1] A. Qomaria, "Dampak sosial ekonomi dan lingkungan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto," *Kebijak. Dan Manaj. Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2015.
- [2] N. N. Priyatna, H. Purnamasari, and R. Ramdani, "Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Prkp) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu Di Kecamatan Karawang Barat)," *J. Pemerintah. Dan Polit.*, vol. 7, no. 3, 2022.
- [3] A. Sulaiman and E. Yolanda, "Implementation Of Uninhabitable House Construction Program (RUTILAHU) In Cimanuk Village, Pandeglang Regency," *JILPR J. Indones. Law Policy Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 35–47, 2020.
- [4] D. Herdiana, "Dampak pembangunan perumahan terhadap perubahan sosial masyarakat desa (studi kasus di Desa Jayamekar, Kabupaten Bandung Barat)," *J. Pembang. Wil. Dan Kota*, vol. 14, no. 4, pp. 265–280, 2018.
- [5] F. X. Sugiyono, *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan*, vol. 4. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.
- [6] I. Hermawan and M. Pd, *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method)*. Hidayatul Quran, 2019.
- [7] Bappeda Banda Aceh, *Statistik Banda Aceh 2017*. Banda Aceh, 2018.
- [8] K. Khairunnisa and N. Nasrudin, "Peranan BSPS Terhadap Ekonomi dan Sosial Penerima Bantuan di Kecamatan Simpang Empat," *JIEP J. Ilmu Ekon. dan Pembang.*, vol. 2, no. 3, pp. 742–759, 2019.
- [9] B. Halimah, "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013," *Fisip Umr. Skripsi*, 2019.
- [10] D. M. Mamonto, J. Abdussamad, and F. P. D. Tui, "Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bone Bolango," *Provid. J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 1, no. 2, pp. 57–66, 2022.
- [11] N. Prawoto, "Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya," *J. Ekon. Stud. Pembang.*, vol. 9, no. 1, pp. 56–68, 2018.
- [12] A. M. D. Safitri, B. U. Sutiyoso, and M. Si, "Dampak Ekonomi Dan Sosial Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu," 2020.
- [13] R. Widayanti and W. Rosdiana, "Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung," *Publika*, vol. 7, no. 2, 2019.
- [14] K. D. Indarto and S. Rahayu, "Dampak pembangunan perumahan terhadap kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar di kelurahan sambiroto, kecamatan tembalang," *Tek. PWK (Perencanaan Wil. Kota)*, vol. 4, no. 3, pp. 428–439, 2020.
- [15] H. Hutapea and D. Suwandono, "Perencanaan Pembangunan Perumahan Baru dan Strategi Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik," *Ruang*, vol. 2, no. 4, pp. 371–380, 2019.
- [16] A. W. Putra and C. T. P. Syahrani, "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupat Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011)," 2020.
- [17] P. Julianto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto baru (2020)," *Qawwam Leader's Writ.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–12, 2020.